

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an :

Q.S. Al-Baqarah ayat 188.

Q.S. Ali Imran ayat 130.

Q.S. Al Anfal ayat 25.

B. Buku-buku :

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

—————, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.

Agus Suryono, *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, UB Press, Malang, 2010.

Ahmad Gunaryo (Ed.), *Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute, Semarang, 2001.

Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

—————, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.

—————, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016.
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Arya Maheka, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Daryanto dan Ismanto Setyobudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, Cetakan Kesatu, Gava Media, Yogyakarta, 2014.
- Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Blantika Jakarta, 2004.
- H.A.S. Moenier, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- HCB Dharmawan, dkk. (ed), *Jihad Melawan Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2005.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Disctionary*, Fifth Edition, Minn West Publishing, St. Paul, 1979.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

- , *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Adminis-trasi)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Joko Widodo, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Citra, Malang, 2001.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Hukum dan HAM RI*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2018.
- Kimberly Ann Elliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- , *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamiknya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Pena Multi Media, Depok, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.
- S.P. Siagian, *Patologi Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

- , *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- , *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Singgih, *Dunia Pun Memerangi Korupsi, Beberapa Catatan Dari International Anti Corruption Conference I-X dan Dokumen PBB Tentang Pemberantasan Korupsi*, Pusat Study Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci Tangerang, 2002.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997.
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, 1986.
- Taufiq Effendi, *Permasalahan dan Peningkatan Kinerja SDM Aparatur Negara Menghadapi Persaingan Global*, Men PAN, Jakarta, 2008.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

—————, *Etika Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

C. Jurnal Hukum :

Abdul Haris, Umar Ma'ruf, dan Sri Kusriyah, *Role And Function Of Attorney In Order To Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D (Case Studies In State Attorney Of Grobogan)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Desember 2019.

Hulman Siregar dan Rakhmat Bowo Suharto, *Analysis and Review of The Implementation of Law Enforcement Operations Juridical Capture Corruption in The Criminal Justice System*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, September 2018.

—————, *Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Maret 2018.

Luk Har Syan'in, Gunarto, dan Widayati, *Criminal Investigation Polres Kudus Unit Efforts In The Prevention Of The Corruption In Village Funds Management*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Maret 2019.

Muhamad Riyadi Putra dan Gunarto, *Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Juni 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Internet :

Dalamislam.com, *Hukum Korupsi Dalam Islam dan Dalilnya*, diakses dalam <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam>, pada 11 Januari 2021, jam : 20.37 WIB.

Jensen Topata, *Pengertian Lingkungan*, diakses dalam <https://www.mypurohith.com/pengertian-lingkungan/>, pada 25 November 2020, jam : 19.02 WIB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Sejarah Kementerian Hukum dan HAM*, diakses dalam <https://www.kemenumham.go.id/profil/sejarah>, pada 25 November 2020, jam : 19.02 WIB.

Muhammad Uwais Al Qarni, *Pelaksanaan*, diakses dalam <http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/pelaksanaan.html>, pada 25 November 2020, jam : 14.28 WIB.

Sudut Hukum, *Pengertian Pencegahan*, diakses dalam <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, pada 25 November 2020, jam : 18.21 WIB.